

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar pertama kali diperkenalkan oleh dua ahli ekonomi yaitu Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar pada akhir 1930-an dan awal 1940-an (Saffar & Wijayanti, 2018:48). Harrod-Domar menekankan bahwa investasi yang dilakukan akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Penanaman modal ialah pokok dari pertumbuhan ekonomi, tepatnya pada sifat rangkap yang dimiliki melalui penanaman modal. Dalam teori ini, dana perimbangan juga dapat digunakan untuk membiayai investasi di suatu daerah, oleh karena itu bisa meningkatkan pembangunan ekonomi (Riyandi & Woyanti, 2022).

Menurut teori Harrod-Domar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Elidawaty & Manurung, 2023) antara lain:

1. **Investasi**

Teori Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi yang dilakukan akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Tabungan

Selain investasi, teori Harrod-Domar juga menekankan pentingnya tabungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tabungan dapat digunakan untuk membiayai investasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat digunakan untuk membiayai investasi di daerah, sehingga bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

4. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam hal ini dapat berupa kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

5. Teknologi

Kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang lebih maju dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi guna memajukan pertumbuhan ekonomi.

2.2 Teori Variabel Y dan X

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai seberapa baik keberhasilan pembangunan dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil (AlQomariah *et al.*, 2022; Limpele *et al.*, 2021). Menurut Dinarjito & Dharmazi (2022), pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama dalam pembangunan. Suatu daerah bisa dikatakan

memperoleh peningkatan pertumbuhan ekonomi apabila mengalami peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan tersebut bisa dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan sebagai acuan untuk memastikan perekonomian suatu daerah (Sisilia & Harsono, 2021). Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah ini adalah untuk mensejahterakan penduduk dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan baru dan juga menaikkan perkembangan aktivitas ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan juga sektor swasta (Muntahanah *et al.*, 2022).

Tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi ditunjukkan dengan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Kesejahteraan akan meningkat sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan akan menurun sebagai respons terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi (Sari *et al.*, 2019). Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan fungsinya dalam perekonomian.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darmawan, 2021). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mamuka *et al.*, 2019).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai sumber keuangan daerah yang mendanai perolehan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan daerah. Hal ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin besar kemampuan daerah memperoleh PAD maka semakin fleksibel daerah tersebut dalam mengalokasikan anggarannya untuk publik (Yasin, 2020).

2.2.3 Dana Alokasi Umum

Undang-Undang No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan Dana Alokasi Umum yang disalurkan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disisihkan untuk keuangan umum daerah, termasuk DAU.

Dana Alokasi Umum yang merupakan salah satu komponen pendapatan umum berfungsi untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memberikan pelayanan penting kepada masyarakat. DAU biasanya digunakan bersamaan dengan inisiatif desentralisasi yang mematuhi hukum setempat. Transfer tanpa syarat, atau DAU adalah transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan rencana belanja tertentu. Untuk mempertahankan dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan publik di suatu daerah, pemerintah daerah menyadari bahwa dana bantuan dari pemerintah federal

cukup membantu. Meningkatnya DAU akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Panggabean *et al.*, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 27, yang mengatur tentang tata cara penetapan Dana Alokasi Umum, antara lain:

1. DAU ditetapkan paling sedikit 25% dari pendapatan bersih dalam negeri disetujui APBN.
2. Bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dibandingkan untuk mengetahui persentase DAU antara provinsi dan kabupaten/kota.
3. Persentase DAU yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dan provinsi masing-masing sebesar 90% dan 10%.
4. APBN digunakan untuk menghitung total DAU sebagaimana dimaksud pada angka 1.

2.2.4 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (*revenue sharing*) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Arina *et al.*, 2019). DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan berdasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun sumber daya alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Daerah penghasil mendapatkan porsi yang

lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian dengan porsi tertentu. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari dana APBN ini dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Muniarti, 2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa dijadikan referensi atau rujukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian secara komprehensif (Ibrahim, 2023). Tabel 2.1 berikut merupakan penelitian terdahulu yang peneliti kutip dan digunakan kembali pada penelitian saat ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ayu & Septiani (2019)	Determinan Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Pendapatan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Pendapatan Transfer X ₃ : Lain-Lain Pendapatan yang Sah Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Pendapatan Transfer berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2.	Arina <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Bagi Hasil X ₃ : Dana Alokasi Umum X ₄ : Dana Alokasi Khusus Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan

				terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3.	Mokorowu <i>et al.</i> (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Bagi Hasil X ₃ : Dana Alokasi Umum X ₄ : Dana Alokasi Khusus Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4.	Yasin (2020)	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Belanja Pembangunan Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5.	AlQomariah <i>et al.</i> (2022)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan

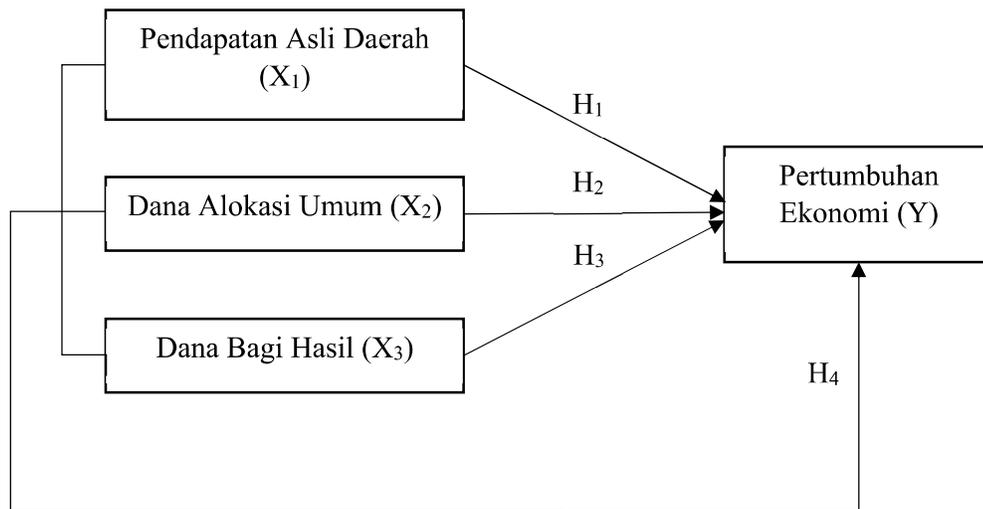
		Hasil, terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X ₃ : Dana Bagi Hasil Y: Pertumbuhan Ekonomi	terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6.	Wahyuni (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Dana Alokasi Umum terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
7.	Paat <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Belitung	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana perimbangan Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
8.	Harahap <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan	X ₁ : Dana alokasi Umum	1. Dana alokasi Umum berpengaruh

		Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening	X ₂ : Pendapatan Asli Daerah Y: Pertumbuhan Ekonomi	secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
9.	Pamukti & Bawono, (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin, dan Luas Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum X ₃ : Jumlah Penduduk Miskin X ₄ : Luas Wilayah Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
10.	Saputera & Pandoyo, (2020)	Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	X ₁ : DAU X ₂ : PAD X ₃ : DAK Y: Pertumbuhan Ekonomi	1. DAU berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah logika teoritis peneliti, didukung oleh teori yang kuat serta dukungan dari temuan penelitian sebelumnya yang signifikan (Firdaus & Zamzam, 2018:75). Kajian ini menggunakan tiga variabel independen antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dengan

variabel dependen yakni Pertumbuhan Ekonomi. Gambar 2.1 merupakan uraian kerangka pemikiran berdasarkan penelitian yang akan dikembangkan antara lain:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan perkiraan atau acuan yang dirumuskan serta diterima sementara yang bisa menjelaskan fakta atau kondisi yang diamati dan digunakan sebagai pedoman dalam tahap penyelidikan lebih lanjut (Rasmini, 2023:65). Adapun hipotesis dalam temuan ini diperoleh berdasarkan kerangka pemikiran antara lain:

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tersendiri dan lain-lain. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan pendanaan guna melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud prinsip desentralisasi (Amin, 2019). Siregar (2023) menyatakan

bahwa Pendapatan Asli Daerah yang meningkat, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.

Asumsi teori harrod-domar dalam penelitian ini juga memprediksi bahwa investasi di daerah dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat secara umum semakin stabil.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ayu & Septiani (2019) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian yang sama juga didapat dalam temuan yang dikerjakan oleh Ariana *et al.* (2019), Mokerowu *et al.* (2019), Wahyuni (2020), Harahap (2019), Pamukti & Bawono (2022), Saputera & Pandoyo (2020) dan Yasin (2020). Namun penelitian yang dilakukan oleh Paat *et al.* (2019) dan AlQomariah *et al.* (2022) menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengajukan rumusan hipotesis pertama yakni:
H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

2.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diterima APBN yang bertujuan untuk pemerataan peluang keuangan antar daerah. Maksudnya ialah untuk mengurangi kesenjangan kemampuan perekonomian daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemungkinan daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan yang terbanyak di

daerah, sehingga semakin tinggi Dana Alokasi Umum, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya (Pamukti & Bawono, 2022). Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Ayu & Septiani, 2019).

Temuan yang dilakukan oleh Ayu Septiani (2019), Mokerowu *et al.* (2019), Wahyuni (2020), Paat *et al.* (2019), Pamukti & Bawono (2022) dan Harahap *et al.* (2019). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariana *et al.* (2019) dan Saputera & Pandoyo (2020), yaitu Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan kurang maksimal pengalokasian realisasi Dana Alokasi Umum bagi pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengajukan rumusan hipotesis kedua yakni:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

2.5.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana APBN daerah otonom yang ditetapkan berdasarkan persentase selama pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan Dana Bagi Hasil yakni untuk menghindari ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan perhatian pada daerah penghasil (Fadilah & Helmayunita, 2020). Semakin banyak Dana Bagi Hasil yang diperoleh, maka semakin banyak pula sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk

mendanai pembangunan yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat (Ayu & Septiani, 2019).

Menurut penelitian AlQomariah *et al.* (2022), Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan pemerintah daerah akan memanfaatkan dana transfer yang mereka terima untuk mendanai proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hasil penelitian yang sama juga didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Septiani (2019). Penelitian lain yang dilakukan Ariana *et al.* (2019) dan Mokerowu *et al.* (2019) mengemukakan hal yang sebaliknya, yaitu Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengajukan rumusan hipotesis ketiga yakni:

H₃: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

2.5.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah tiga jenis pendapatan daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai dengan teori harrod-domar yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan daerah serta pendapatan transfer, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Arina *et al.*, 2019).

Temuan yang dikerjakan oleh Mokerowu *et al.* (2019), Wahyuni (2020), Harahap *et al.* (2019), Pamukti & Bawono (2022), Ayu & Septiani (2019), Paat *et*

al. (2019), AlQomariah *et al.* (2022), Saputera & Pandoyo (2020) dan Yasin (2020), menunjukkan pada variabel Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengajukan rumusan hipotesis keempat yakni:

H₄: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.